

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Review penelitian terdahulu adalah merupakan tinjauan atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dan masih relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, oleh karena itu penelitian ini juga mengacu pada beberapa penelitian tersebut sebagai bahan referensi.

Penelitian mengenai variabel pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh Ulisanti dan Asrori (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang rendah akan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah, sehingga kompetensi sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Kinerja karyawan akan mempengaruhi bagaimana kualitas laporan keuangan disajikan dengan baik. (Daryanto *et al.*, 2020). Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif, sehingga akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan. (Zai *et al.*, 2020). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratolo dan Jatmiko (2020), Ivana *et al.* (2020), Tampubolon dan Basid (2019), Dewi *et al.* (2019) Ernawati dan Budiyono (2019), Gasperz (2019), Yaqin dan Jatmiko (2018), Palimbong (2018), Hanafiah *et al.* (2016), Kuasa *et al.* (2016), Synthia (2016), Sagara (2015) bahwa kompetensi sumber daya manusia yang baik akan mendukung kualitas laporan keuangan.

Sumber Daya Manusia merupakan aset utama organisasi yang perencanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan supaya efektif dan efisien dalam menunjang tercapainya tujuan. (Hombing *et al.*, 2020). Dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang terampil dan mempunyai keahlian di bidang akuntansi, memudahkan suatu instansi untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. (Rosmalita dan Nadirsyah, 2020). Pegawai pemerintah yang

baik harus melatih kompetensi atau kemampuan dan menambah wawasan dibidang akuntansi baik secara teori dan praktek maupun secara manual atau terkomputerisasi. (Sumaryati *et al.*, 2020). Menurut Mardinan *et al.* (2018) instansi harus memberikan kesempatan kepada pegawai khususnya bagian keuangan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan teknis yang dapat meningkatkan kompetensinya dalam pengelolaan keuangan. Pegawai pengelola keuangan perlu ditempatkan sesuai keahliannya masing-masing (*the right man on the right place*), meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan, melakukan pemetaan dan penataan SDM yang berkualitas sesuai dengan bidangnya, penilaian kinerja yang objektif, pemberian apresiasi dan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi dengan tujuan memacu kinerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik. (Samosir dan Setiyawati, 2019). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar (2018), Umar *et al.* (2018), Idward *et al.* (2018), Nahar *et al.* (2017), Rozi *et al.* (2017), Simon *et al.* (2016) bahwa tinggi rendahnya kinerja pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatihan yang didapat

Irvan *et al.* (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang baik secara langsung berpengaruh terhadap kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kebijakan, prosedur dan peraturan sehingga dapat membantu terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan akan lebih baik jika pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sikap rasional dan bertanggung jawab, dan cukup pengalaman (Nurlis, 2017). Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja dan merupakan hal terpenting untuk menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Febiani *et al.*, 2016). Ketidakmampuan pegawai dalam pengelolaan keuangan, kurangnya latar belakang akuntansi dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk menganalisis dan memahami laporan keuangan (Afiah dan Rahmatika, 2014). Hasil ini sesuai dengan kerangka pemikiran yang menyatakan bahwa karyawan dengan human capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompentensi tinggi (Nurillah dan Muid, 2014).

Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Kusuma *et al.* (2021) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah dimana dalam penelitiannya menemukan masih belum adanya pemisahan tugas atau tanggung jawab yang jelas oleh pimpinan sehingga masih terjadi rangkap penugasan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khotimah *et al.* (2020), Philadelphia *et al.* (2020), Muda *et al.* (2017), Inapty dan Martiningsih (21016) bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya kapasitas dan jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, tetapi satker tetap memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian, sehingga menurut Indah dan Setiyawati (2019), kompetensi Sumber Daya Manusia memang terbukti tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena seluruh rangkaian penyajian laporan keuangan telah terintegrasi dengan sistem aplikasi yang digunakan organisasi.

Penelitian variabel pengaruh penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh Zai *et al.* (2020) yang menyatakan *good governance* yang dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan visi strategis, sehingga sumber daya daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan membuat kinerja yang baik yang akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Diperlukan standar tata kelola yang jelas untuk sektor publik dan memastikan penerapan prinsip-prinsipnya dengan benar melalui tindakan dan pedoman tertentu (Alqooti, 2020). Penerapan *good governance* akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (Philadelphia *et al.*, 2020) dan jika dilakukan dengan baik maka akan diikuti dengan peningkatan kualitas laporan keuangan (Wijayanti *et al.*, 2020). Penerapan *good governance* yang efektif adalah memastikan kondisi kinerja yang cukup untuk kinerja terbaik dari setiap organisasi (Murugan, 2018). Simon *et al.* (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang diterapkan dengan baik secara signifikan mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Tata kelola yang baik perlu dilakukan sesuai

dengan prinsip keterbukaan, kewajaran, dan sosial untuk menghasilkan informasi pelaporan keuangan yang andal.

Hasil penelitian Yusniyar *et al.* (2016) menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan prinsip-prinsip *good governance* memberikan kontribusi yang sedang dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor public. Hal ini sejalan dengan penelitian Afiah dan Azwari (2015), bahwa semakin berjalan penerapan *good governance* maka kualitas informasi laporan keuangan tersebut akan semakin baik. Tata kelola pengungkapan dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan ketika dijalankan secara efektif, ini dapat mencegah munculnya skandal korupsi, penipuan, dan pertanggung jawaban pidana (Ram dan Kolmkar, 2015). Bawaneh (2015) menyatakan bahwa penerapan tata kelola seperti: meningkatkan peran para pemangku kepentingan dalam menggunakan haknya memberikan masukan kepada pemerintah untuk memastikan perkembangan yang tepat dan seimbang bagi pemerintah secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Penelitian dengan hasil berbeda mengenai pengaruh penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Florin (2020) yang menyatakan bahwa proses tata kelola tidak menjamin keberhasilan karena dalam prakteknya tergantung pada lingkungan sosial ekonomi, perilaku sosial dan strategi yang mereka asumsikan dan terapkan. Kebutuhan untuk menyatukan visi baru untuk melakukan perubahan pemikiran tradisional yang kaku menuju pemikiran inovatif dan fleksibel dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam pemecahan masalah dan meningkatkan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan pemerintah. Peningkatan peran pelaku ekonomi swasta dalam proses pemerintahan menghasilkan efek demokrasi yang bertanggung jawab melalui pertukaran informasi dan strategi implementasi sulit untuk diterapkan. Implementasi *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah disebabkan dalam penyelenggaraannya belum berjalan dengan baik dan belum diterapkan secara efektif, terutama terkait dengan tingkat partisipasi dan transparansi sehingga belum mampu mempengaruhi keandalan laporan keuangan (Jauhari *et al.*, 2019). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutapea dan Widyaningsih (2017) bahwa tidak

terdapat pengaruh yang signifikan dari *good governance* terhadap kinerja pemerintah.

Penelitian mengenai variabel pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh Kalyani dan Murugan (2021) bahwa pelaksanaan pengendalian internal yang sistematis, efektif dan terkoordinasi atas kerangka pelaporan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Dalam pelaksanaannya pengendalian internal harus senantiasa ditingkatkan (Anuruddha dan Mahanamahewa, 2021). Sistem pengendalian internal adalah infrastruktur berkesinambungan yang mampu mengurangi kemungkinan kesalahan dan kecurangan pengelolaan keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap lingkungan hukum. Untuk membangun sistem dan memastikan efektivitasnya, perusahaan harus berupaya intensif dan menetapkan target (Aytac dan Cabuk, 2020). Perlu pengawasan yang ketat dalam pengelolaan keuangan pemerintah agar setiap tahapan proses dapat efisien, efektif, sesuai dengan ketentuan. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah harus mampu meyakinkan bahwa informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut berkualitas (Yanti *et al.*, 2020). Pengawasan yang semakin baik akan membuat pengelolaan keuangan pemerintah berjalan sesuai rencana dan menghasilkan kinerja keuangan yang terlihat pada laporan keuangan pemerintah yang berkualitas (Rosmalita dan Nadirsyah, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kusuma *et al.* (2021), Ivana *et al.* (2020), Handayani *atal.* (2020), Dewi *et al.* (2019), Ernawati dan Budiyo (2019), Gasperz (2019), Umar *et al.* (2018), Bachmid (2018), Palimbong *et al.* (2018), Hanafiah *et al.* (2016), Kuasa *et al.* (2016), Lagat *et al.* (2016), Kasim (2015) bahwa penerapan pengendalian internal yang baik akan menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas baik.

Menurut Samosir dan Setiyawati (2019), pemerintah harus terus meningkatkan lingkungan pengendalian dengan memperhatikan komitmen kompetensi dan memiliki prosedur yang efektif untuk memantau wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan. Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan dengan berpedoman kepada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif (Martini *et al.*, 2019). Dalam rangka penyediaan arah dan kebijakan dalam penyusunan kebijakan/pedoman penilaian dan pelaksanaan risiko dibuat secara berkala dan terdokumentasi serta manajemen risiko harus terus dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan perubahan kebutuhan atau harapan yang dilakukan *stake holder* dan pemantauan otomatis oleh pimpinan institusi, sehingga penerapan pengendalian internal di seluruh unit kerja akan terhindar dari fraud dan kesalahan serta dapat memberikan keyakinan terhadap laporan keuangan (Mardinan *et al.*, 2018).

Rahmawati *et al.* (2018) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah jika dilaksanakan secara baik. Sistem pengendalian internal memiliki lima indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan, Sehingga semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah (Yaqin dan Jatmiko, 2018). Berjalannya sistem pengendalian intern akan membuat seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor/manajer/pemimpin, sehingga menumbuhkan keinginan dan usaha dari pegawai untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas (Idward *et al.*, 2018), yaitu pengendalian semua kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pengelola keuangan didasarkan kebijakan, prosedur dan aturan yang berlaku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga segala kesalahan dan kecurangan dapat dihindari karena akan berkontribusi pada terciptanya tata kelola yang baik (Irvan *et al.*, 2017).

Menurut Rozi *et al.* (2017), pengendalian internal pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan internal dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan

ketentuan yang ada. Pengendalian intern harus mampu memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk mencapai tingkat maksimal yang diharapkan (Yusniyar *et al.*, 2016). Kontribusi penerapan sistem pengendalian intern menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kebocoran dan penyimpangan yang masih ditemukan dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan belum memenuhi karakteristik *reliable*. (Afiah dan Azwari, 2015).

Struktur pengendalian internal yang baik merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas serta meminimalisir adanya kecurangan dan penyimpangan dalam alokasi dan pencairan dana publik oleh pemerintah. Tingkat korupsi yang masih tinggi di tingkat manajemen puncak, transparansi yang buruk, dan keuangan yang buruk, pengungkapan dan kurangnya pemahaman tentang kebijakan dan prosedur akuntansi di antara staf adalah penyebab utama dari miskin akuntabilitas keuangan di tingkat pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif membuka jalan menuju akuntabilitas yang baik, oleh karena mekanisme kontrol yang ketat, seperti verifikasi transaksi dan dokumen keuangan lainnya, persetujuan dan konfirmasi transaksi keuangan, pengendalian atas kas dan bank. Perlu diterapkan hukuman berat bagi petugas yang melakukan kesalahan untuk meningkatkan pengendalian internal yang baik dan akuntabilitas keuangan. Alat mekanisme utama yang tersedia untuk mencapai pengendalian internal dan akuntabilitas keuangan yang efektif di tingkat pemerintah adalah komitmen staf terhadap akuntabilitas serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur akuntansi, dan pemberian imbalan atas perilaku yang baik.

Penelitian dengan hasil berbeda yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh Nurlis (2017) yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan disebabkan sistem pengendalian internal pemerintah yang ditetapkan belum diterapkan secara efektif, menyebabkan kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan tidak memuaskan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Philadelphia *et al.* (2020), Sumaryati *et al.* (2020), Simon *et al.* (2016) bahwa

sistem pengendalian intern yang diterapkan selama ini belum sepenuhnya dijalankan dengan baik yang berimplikasi pada menurunnya kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Sistem pengendalian intern perlu ditingkatkan dengan menerapkan komponen pengendalian intern pada setiap kegiatan operasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban kegiatan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif sehingga dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang relevan, andal, sebanding, dan bisa dimengerti.

Penelitian mengenai variabel pengaruh penggunaan teknologi komputer terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh Anuruddha dan Mahanamahewa (2021) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi komputer berpengaruh positif berkontribusi dalam menentukan kualitas pelaporan keuangan publik. Penerapan sistem komputer yang semakin baik maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah. Teknologi komputer dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai dalam melakukan pekerjaannya (Daryanto *et al.*, 2020). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ivana *et al.* (2020), Khotimah *et al.* (2020), Jauhari *et al.* (2019), Ernawati dan Budiyo (2019), Palimbong *et al.* (2018), Muda *et al.* (2017), Sagara (2015), Nurillah dan Muid (2014) bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi komputer maka akan semakin baik laporan keuangan yang disajikan.

Teknologi komputer merupakan sistem yang mampu menghemat waktu yang diperlukan untuk menghitung, mencatat, mengelompokkan serta meringkas komputer akuntansi secara tepat waktu dan akurat untuk keperluan pengambilan keputusan yang sangat penting bagi para pengguna laporan keuangan (Hombing *et al.*, 2020). Pemanfaatan sistem komputer mendukung penyajian pelaporan keuangan yang handal dan membantu instansi untuk melaksanakan tugas-tugas secara cepat sehingga biaya dalam pengolahan data menjadi lebih hemat, dan mendukung penyajian pelaporan keuangan yang handal. (Rosmalita dan Nadirsyah, 2020). Mota dan Cilento (2020) menyatakan bahwa pengetahuan tentang internet dan lingkungan digital menjadi penting dalam kemampuan mengevaluasi konten online, dan mereka harus menjadi bagian dari program literasi digital yang dilakukan pemerintah.

Samosir dan Setiyawati (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi komputer perlu lebih dioptimalkan dengan menyiapkan, membangun dan meningkatkan infrastruktur dan jaringan teknologi komputer yang handal dan baik serta berkualitas serta membuat pedoman pemanfaatan teknologi komputer dalam rangka mendukung akuntabilitas dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Pemanfaatan pemanfaatan teknologi komputer yang optimal perlu didukung komitmen organisasi yang kuat (Handayani *et al.*, 2020). Penggunaan teknologi komputer dan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, jaringan internet, proses penyusunan laporan keuangan yang terkomputerisasi terbukti sangat berpengaruh dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Indah dan Setiyawati, 2019). Penggunaan teknologi komputer harus diimbangi dengan pemberian motivasi dan prasarana yang memadai, sehingga perlu adanya arahan dan kebijakan pimpinan untuk menjamin pemeliharaan dan dukungan anggaran yang diperlukan untuk mengupayakan agar teknologi komputer dapat dimanfaatkan secara optimal (Mardinan *et al.*, 2018).

Edward *et al.* (2018) menyatakan bahwa penggunaan teknologi komputer dalam mendukung sistem komputer keuangan meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan internet. Penggunaan teknologi komputer untuk mendukung pelaporan keuangan perlu didukung sistem keamanan komputer yang diperbarui secara terjadwal. (Rahmawati *et al.*, 2018). Ketersediaan perangkat komputer sebagai wahana atau wadah yang digunakan untuk menerapkan teknologi komputer di bidang keuangan harus diimbangi jumlah perangkat yang sesuai dengan besarnya volume transaksi sehingga penyelesaian pekerjaan tidak mengalami keterlambatan (Irvan *et al.*, 2017). Pemeliharaan dan pengembangan semua aplikasi yang berhubungan dengan penyiapan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan perlu terus dikembangkan dan dibuatkan panduan, agar laporan keuangan yang disajikan selalu akurat dan meminimalisir terjadinya kesalahan.

Penelitian dengan hasil yang berbeda dilakukan oleh Kusuma *et al.* (2021) bahwa penggunaan teknologi komputer tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah disebabkan selama proses pengelolaan hingga pelaporan keuangan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi komputer. Hasil

ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumaryati *et al.* (2020) dimana instansi pemerintah belum sepenuhnya dapat membuktikan bahwa mereka mampu mengimplementasikan SIA dengan baik. Kurangnya jumlah operator dan perangkat komputer yang memadai serta kurangnya komitmen dari pimpinan untuk mengembangkan teknologi komputer dalam pengelolaan keuangan menjadi penyebab penggunaan teknologi komputer menjadi tidak berpengaruh dalam pengelolaan laporan keuangan. Yanti *et al.* (2020) menyatakan bahwa kurangnya kontrol oleh para aparat berakibat sistem komputerisasi akan mudah mengalami kendala yang akan menghambat proses pelaporan keuangan yang berkualitas serta dimanfaatkan secara bijak oleh aparat pemerintah. Menurut Nurlis (2017) teknologi komputer tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan karena fasilitas teknologi komputer tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, kurangnya ketersediaan komputer yang memadai, ketersediaan jaringan internet yang belum optimal, dan implementasi teknologi komputer yang membutuhkan banyak biaya. Implementasi dari teknologi komputer menjadi sia-sia dan lebih mahal serta tidak dapat mendukung kualitas pelaporan keuangan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut PSAK 1 paragraf 9 disebutkan bahwa laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi asset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas". (PSAK 1, 2018 : par 9)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dalam pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara selama satu periode akuntansi. Kualitas Laporan Keuangan Kementerian (LKKL) dapat terlihat dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan dilakukan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara didasarkan kepada pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam PP 71/2010 laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (2010 : par 35), “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif sebagai berikut :

- 1) Relevan. Informasi dikatakan relevan apabila:
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dengan pengungkapan yang lengkap agar tidak terjadi kekeliruan dalam penggunaannya
- 2) Andal. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
 - a) Penyajian jujur. Menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar.
 - b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
 - 3) Dapat dibandingkan. Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
 - 4) Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Laporan keuangan pemerintah kemudian teruskan kepada pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Agar informasi Laporan keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi para penggunanya maka harus memenuhi kualitas tertentu.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa “laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

2.2.2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Boulter (2003:39) dalam Sutrisno (2016:203) mengemukakan, bahwa “kompetensi adalah suatu karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, atau situasi tertentu”. Kompetensi juga dapat sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas yang sesuai dengan *perform* yang ditetapkan”. (Gaol, 2019 : 503)

Menurut UU No 5 (2014 : pasal 69) dijelaskan bahwa “kompetensi Aparatur Sipil Negara meliputi :

- 1) kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
- 2) kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan;
- 3) kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan”.

Laporan keuangan pemerintah dapat berkualitas apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, senantiasa memperbaharui ilmu dan keterampilannya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman bekerja di bidang keuangan. Sehingga sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat memahami logika akuntansi dengan benar. Kegagalan sumber daya manusia untuk memahami dan menerapkan logika akuntansi, akan berdampak pada

laporan keuangan yang keliru dan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

2.2.2.2 Penerapan *Good Governance*

Lundqvis (2011:97) mendefinisikan *good governance* sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang terpercaya, pemerintahan yang bertanggung jawab (*accountable*) pada rakyatnya. *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggungjawab, efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (*state, private sector and society*)”.

Definisi *Good Governance* menurut UNDP (*United National Development Program*) (1997:10) dalam Reawansyah (2010:85) adalah “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Tata kelola pemerintahan yang baik meliputi semua mekanisme, proses dan lembaga-lembaga, dimana setiap warga dan kelompok masyarakat dapat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban serta menjembatani perbedaan- perbedaan diantara mereka. Merujuk pada konsep tersebut, *Good Governance* memiliki atribut kunci yaitu efektif, transparan, akuntabel, produktif, partisipatif, serta sejajar serta mampu mempromosikan penegakan supremasi hukum. Wardani (2010 : 98) berpendapat “atribut utama dari *Good Governance* adalah bagaimana kekuasaan dan otoritas digunakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan politik. Mekanisme kontrol (*check and balance*) perlu ditegakkan, sehingga kekuasaan tidak berpusat pada satu komponen. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menegakkan akuntabilitas sistem struktur, organisasi dan staf atas apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi, tugasnya antara lain tercermin dari perilaku dan budaya kerjanya”.

Karakteristik pelaksanaan *Good Governance* menurut UNDP meliputi :

1) Partisipasi (*Participation*)

Setiap warga masyarakat memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik dilaksanakan secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan aspirasinya masing-masing. Partisipasi

yang luas ini harus dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berasosiasi, berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2) Aturan Hukum

Pelaksanaan pemerintahan yang baik membutuhkan kerangka hukum yang *fair* dan penegakkan hukum dalam pelaksanaan tanpa terkecuali. Penegakan hukum secara mutlak membutuhkan pengadilan yang independen dan pihak kepolisian yang tidak korupsi.

3) Transparansi

Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi baru harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi.

4) Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus mampu melayani semua *stakeholders* secara baik, cepat, dan dalam waktu yang tepat (tanggap terhadap keinginan masyarakat).

5) Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Dalam hubungan yang saling melengkapi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, pemerintah bertindak sebagai penengah (mediator) terhadap berbagai kepentingan yang berbeda dalam mencapai *consensus* atau kesepakatan terbaik bagi kepentingan semua pihak dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai prosedur dan kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah.

6) Berkeadilan

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7) Efektivitas dan Efisiensi

Setiap tahapan proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber daya yang ada.

8) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat madani sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*), memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, tergantung apakah jenis keputusan organisasi tersebut bersifat internal atau eksternal.

9) Bervisi Strategi

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan manusia (*human development*), dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek kultural, historis, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Perpres 81 (2010:6), menargetkan pada tahun 2025 telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Reformasi yang sudah dilakukan sejak terjadinya krisis multidimensi tahun 1998 telah berhasil meletakkan landasan politik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara, revitalisasi lembaga-lembaga tinggi negara, dan pemilihan umum dilakukan dalam rangka membangun pemerintahan negara yang mampu berjalan dengan baik (*good governance*). Reformasi juga telah mampu membawa kondisi ekonomi yang semakin baik, sehingga mengantarkan Indonesia kembali ke dalam jajaran *middle income countries (MICs)*.

2.2.2.3 Pengendalian Intern

Pengendalian intern pemerintah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 (2008 : pasal 1) SPIP adalah “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Peraturan Pemerintah No. 60 (2008 : pasal 3-46), “pengendalian intern terdiri dari lima unsur, yaitu:

- 1) Lingkungan pengendalian, merupakan dasar semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
- 2) Penilaian risiko, yaitu identifikasi dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.
- 3) Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
- 4) Informasi dan komunikasi, dimana pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat
- 5) Pemantauan pengendalian intern secara berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010, pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah meliputi:

- a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP,
- b. sosialisasi,
- c. pendidikan dan pelatihan SPIP,
- d. pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan
- e. peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah, dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Laporan keuangan hanya merupakan output dari sebuah proses pelaporan keuangan, namun laporan keuangan dapat dikatakan sebagai representasi kinerja manajemen publik selama tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, karena sejatinya dalam pengendalian intern terdapat proses, kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh pemerintah untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal dan sesuai dengan kerangka standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

2.2.2.4 Penggunaan Teknologi Komputer

Pengertian teknologi komputer menurut Sutabri (2014: 3) adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan”. “Teknologi komputer adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi.” Mulyadi (2014: 21)

Definisi teknologi komputer menurut Kadir dan Triwahyuni (2013: 10) adalah studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar”. Lebih spesifik teknologi komputer menurut Darmawan (2012: 17) mendefinisikan bahwa teknologi komputer adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, lebih lama penyimpanannya”.

George (2010: 4) mengartikan teknologi komputer adalah *“Information technology (IT) includes all tools that capture, store, process, exchange, and use information. The field of IT includes computer hardware, such as mainframe computers, servers, laptops, and PDAs; software, such as operating systems and applications for performing various functions; networks and related equipment, such as modems, routers, and switches; and databases for storing important data”*.

Pesatnya kemajuan teknologi komputer dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses dan mengelola informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Menurut Widjajanto (2001:89), secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi komputer antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu penyusunan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi akan meningkatkan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi komputer untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

2.3. Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis Penelitian

2.3.1. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi berarti kemampuan yang harus dimiliki seorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kompetensi sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas seseorang demi keberhasilan organisasinya. Kompetensi aparatur sipil negara berupa kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Keberhasilan organisasi dinilai dari laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan serta keterampilan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ulisanti dan Asrori (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Kompetensi yang rendah akan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah, sehingga kompetensi sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Usman *et al.* (2021) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan kinerja keuangan pada organisasi pemerintah. Setiap bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Bagian keuangan yang harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya. (Nurillah dan Muid, 2017).

Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi memiliki peranan yang sangat penting, karena yang menjalankan serta mengelola suatu organisasi adalah sumber daya manusianya. Diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya. Sama halnya dalam menghasilkan laporan

keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten.

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2.3.2. Hubungan Penerapan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Good governance sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang terpercaya, pemerintahan yang bertanggung jawab (*accountable*) pada rakyatnya. *Good governance* merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggungjawab, efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (*state, private sector and society*).

Adanya partisipasi masyarakat, penegakan aturan hukum yang fair, informasi yang transparan dan mudah diakses, tanggap serta mampu melayani semua *stakeholders* secara baik, cepat, dan dalam waktu yang tepat dalam pengelolaan keuangan negara akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Mekanisme kontrol (*check and balance*) melalui akan membuat mekanisme penegakkan akuntabilitas sistem struktur, organisasi dan staf atas apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi, tugasnya antara lain tercermin dari perilaku dan budaya kerjanya.

Sejalan dengan teori, Zai *et al.* (2020), Sunarsih dan Oktaviani (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *good governance* yang dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan visi strategis, akan meningkatkan kinerja pegawai dan akhirnya akan berdampak pada laporan keuangan yang berkualitas. Diperlukan standar tata kelola yang jelas untuk sektor publik dan memastikan penerapan prinsip-prinsipnya dengan benar melalui tindakan dan pedoman tertentu (Alqooti, 2020), Sunarsih dan Oktaviani, (2016). Penerapan *good governance* akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (Philadelphphia *et al.*, 2020) dan jika dilakukan dengan baik maka akan diikuti dengan peningkatan kualitas laporan keuangan (Wijayanti *et al.*, 2020).

Reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah dengan penerapan *good governance* diharapkan akan meningkatkan kinerja dan pelayanan oleh instansi pemerintah. Dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H2 : Penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2.3.3. Hubungan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 (2008:pasal 1), menyatakan “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian penyelenggaraan pemerintah negara/daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Artinya apabila sistem pengendalian intern dilaksanakan dengan baik, maka seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah akan berjalan dengan baik sehingga akan memberikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang berkualitas”.

Penelitian yang mendukung teori dilakukan oleh Kalyani dan Murugan (2021); Rizqi & Idawati, (2018) bahwa pelaksanaan pengendalian internal yang sistematis, efektif dan terkoordinasi atas kerangka pelaporan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian internal adalah merupakan infrastruktur berkesinambungan dalam rangka kontrol terhadap kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan serta meningkatkan kepatuhan terhadap lingkungan hukum. Untuk membangun sistem dan memastikan efektivitasnya, pemerintah harus berupaya intensif dan menetapkan target (Aytac dan Cabuk, 2020); Rahayu, et all (2020). Perlu pengawasan yang ketat dalam pengelolaan keuangan pemerintah agar setiap tahapan proses dapat efisien, efektif, sesuai dengan ketentuan. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah harus mampu meyakinkan bahwa informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut berkualitas (Yanti *et al.*, 2020); Jayanti et all (2020).

Implementasi pengendalian internal yang baik dan berkesinambungan di setiap tahapan akan mencegah tindakan *fraud*/kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara dan memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan, sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2.3.4. Hubungan Penggunaan Teknologi Komputer terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Salah satu aspek penting yang sangat berpengaruh dan menjadi kekuatan utama dalam kehidupan individu maupun organisasi adalah munculnya teknologi. Dengan menggunakan komputer berteknologi tinggi penyelesaian tugas menjadi lebih lancar dengan hasil yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Pemerintah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi komputer agar dapat meningkatkan kemampuan mengelola keuangan pemerintah, maupun menyalurkan Informasi Keuangan pemerintah kepadapelayanan publik.

Penelitian yang mendukung teori dilakukan oleh Mahanamahewa (2021) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi komputer dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Teknologi komputer mampu menghemat waktu yang diperlukan untuk menghitung, mencatat, mengelompokkan serta meringkas informasi akuntansi secara tepat waktu dan akurat sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat (Hombing *et.al*, 2020). Pemanfaatan sistem komputer mendukung penyajian pelaporan keuangan yang handal dan membantu instansi untuk melaksanakan tugas-tugas secara cepat sehingga biaya dalam pengolahan data menjadi lebih hemat, dan mendukung penyajian pelaporan keuangan yang handal. Adanya jaringan internet juga sangat bermanfaat bagi unit kerja sebagai

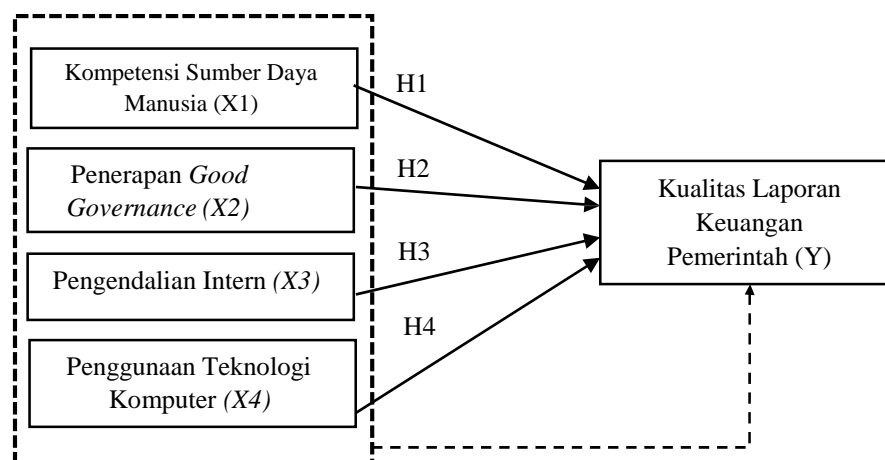
penghubung dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan (Rahmawati *et al.*, 2018).

Teknologi komputer telah diterapkan pada proses transaksi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah melalui aplikasi SAKTI dan SAIBA terbukti telah membuat pekerjaan pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan menjadi lebih mudah dan lebih seragam di setiap instansi. Database dalam aplikasi SAKTI dan SAIBA ini telah terintegrasi dan berpusat di Kementerian Keuangan, sehingga pembuatan laporan keuangan secara nasional dapat dilakukan secara cepat. Berdasarkan teori, penelitian dan fenomena di lapangan maka peneliti membuat hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah :

H4 : Penggunaan Teknologi Komputer berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dan landasan teori yang dibangun, kerangka konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian